



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : DEWAN DIREKSI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD IKBAL NUR
2. Jabatan : DIREKTUR PERENCANAAN KORPORAT
3. NHK : 194804

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.200.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 224 m2/300 m2 di KOTA JAKARTA SELATAN , WARISAN Rp. 900.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 54 m2/54 m2 di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 212 m2/160 m2 di KOTA MAKASSAR , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 200.000.000

1. MOBIL, MITSUBISI OUTLANDER JEEP Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 553.580.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 10.848.102.429

F. HARTA LAINNYA Rp. 200.000.000

Sub Total Rp. 14.001.682.429

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 14.001.682.429

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.